

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- A. W. Widjaja, 2004, *Etika Administrasi Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Haris dan Nyoman Adika, 2002, *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional*, LESFI, Yogyakarta.
- Ammirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Kebijakan Kepegawaian Negara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu*, Jakarta, 1999, hlm.2.
- Didik Sukrino, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyati, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, dikutip dari Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Kedua, edisi. Pertama, Laksbang Meditama, Surabaya.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung.
- Mestika Zed, 2007, *Metode penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Musanef, 1996, *Manajemen kepegawaian di Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Pasolong Harbani, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Philippus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjja Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinambela, Lijan, Poltak, dkk, 2006 *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, IKAPI, Bandung.
- Sutarman, 2002, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Disertasi Airlangga, Malang.
- Tjahya Supriyatna, 1996, *Administrasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik*, Nimas Multina, Bandung.

Yhudi Setiawan dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintah: Teori dan Praktik (dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Rajawali Pers, Depok.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. JURNAL

Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina, 2016, “Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)“, *Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Ali Hadi La Dimuru, 2017, “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa”, *Jurnal Sosial Dan Politik Al-Qisthi*, Volume VII Nomor II.

Ardelli Marselli, dkk, 2016, “Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3. 2016.

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, 2014, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, 2018, Rapat Pertemuan di Pusat Dalam Rangka Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2018

Eet Saeful Hidayat, 2017, “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut”, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Garut.

Febri Yanti dan Geovani Meiwanda, 2022, “Pelaksanaan Inovasi Di Bidang Administrasi Kependudukan Kota Payakumbuh”, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Riau.

Rahmawati Sururama dan Alfariz Firdausya, 2021, “Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah”, *Jurnal Media Demokrasi*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 64-79.

Sesario Fernandes dan Serly Wulandari, 2020, “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok”, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 2, Oktober 2020: 145-147.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **D. INTERNET DAN SUMBER LAINNYA**

<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia> diakses pada tanggal 20 Februari 2023, Jam 23.00 WIB.

<https://www.jogloabang.com/gaya/permendagri-2-2016-kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 7 Februari 2023, Jam 20.00 WIB.

<https://www.sehatq.com/artikel/kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 6 Maret 23.45 WIB.

